

## **STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRANCIS DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONALNYA DI KAWASAN INDO-PASIFIK PERIODE 2018-2022**

**Budi Santosa<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai strategi dan kepentingan Prancis di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada paparan strategi dan capaian Prancis di kawasan Indo Pasifik pada aspek-aspek pertahanan dan keamanan, politik internasional, lingkungan, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif eksploratif. Teori yang digunakan adalah teori neorealisme, teori kepentingan nasional dan konsep kerangka strategis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan strategi Prancis di kawasan Indo-Pasifik dengan menganalisis langkah-langkah pemenuhan kepentingan nasional Prancis di kawasan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Prancis di kawasan ini untuk pencapaian keamanan, pertahanan serta pemenuhan kepentingan ekonomi yang dicapai melalui kerjasama dan didasari oleh landasan hukum internasional. Disamping itu, Prancis juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam keamanan lingkungan akibat dari perubahan iklim. Dimana hal tersebut dapat berdampak secara langsung kepada aspek keamanan dan ekonomi. Dalam prosesnya, Prancis berhasil mencapai kepentingan-kepentingan tersebut melalui penguatan angkatan bersenjata yang ditempatkan di beberapa titik di kawasan Indo-Pasifik, juga melalui jalinan kerjasama dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Kata Kunci: Indo-Pasifik, Keamanan, Ekonomi dan Kerja Sama Kemitraan

### **ABSTRACT**

This research discusses France's strategy and interests in the Indo-Pacific region. This research focuses the discussion on explaining France's strategy and achievements in the Indo Pacific region on aspects of defense and security, international politics, the environment, and the economy. This research uses qualitative research methods, with an exploratory descriptive research type. The theories used are neorealism theory, national interest theory and the strategic framework concept. The aim of this research is to explain France's strategy in the Indo-Pacific region by analyzing steps to fulfill France's national interests in the region. The results of this research show that France's interests in this region are to achieve security, defense and fulfill economic interests which are achieved through cooperation and are based on international legal foundations. Apart from that, France is also committed to contributing to environmental security as a result of climate change. This can have a direct impact on security and economic aspects. In the process, France succeeded in achieving these interests through strengthening the armed forces stationed at several points in the Indo-Pacific region, as well as through establishing cooperation and coordination with countries in the region.

Keywords: Indo-Pacific, Security, Economy, and Partnership Cooperation.

## PENDAHULUAN

Sastra geostrategis saat ini membahas perubahan signifikan yang tengah terjadi di wilayah Indo-Pasifik. Wilayah ini menjadi pusat perhatian dunia akibat perubahan strategis yang dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap keamanan regional dan global. Sejumlah perubahan utama yang tengah terjadi di Indo-Pasifik berdampak terhadap keseimbangan kekuatan, tantangan transnasional, serta potensi kerjasama dan peluang ekonomi yang bisa dijelajahi (Savoy & Bryja, 2023).

Salah satu perubahan paling mencolok adalah meningkatnya kekuatan China. China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, yang mendukung pengembangan kekuatan militer mereka (Jaknanihan, 2022). Ekspresi klaim wilayah mereka juga semakin kuat, terutama dalam konteks Laut China Selatan (Davidson, 2023). Hal ini menciptakan ketegangan dengan negara-negara tetangga, termasuk Vietnam, Filipina, dan Indonesia.

Kompetisi antara China dan Amerika Serikat semakin meningkat, termasuk di wilayah Indo-Pasifik. Ini mencakup persaingan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer. Tensi di perbatasan Tiongkok-India, di Selat Taiwan, dan di Semenanjung Korea semakin menunjukkan kompleksitas perubahan strategis ini (Nashir, Komeini, & Abdurofiq, 2022). Wilayah Indo-Pasifik juga dihadapkan pada sejumlah ancaman transnasional yang mencakup perompakan, terorisme, perdagangan ilegal (narkoba, batu mulia, kayu, spesies dilindungi, dll.), penangkapan ikan ilegal, dan krisis proliferasi yang belum terselesaikan (Lindley, 2020). Selain itu, dampak bencana alam akibat perubahan iklim juga telah mulai dirasakan dalam hal keamanan. Perubahan strategis di Indo-Pasifik tercermin dalam peningkatan kemiliteran negara-negara di kawasan ini (Tertia & Perwita, 2018). Banyak negara di Indo-Pasifik telah meningkatkan belanja pertahanan mereka dalam satu dekade terakhir (Christie, Buts, & Bois, 2023, pp. 587-590). Kombinasi ini dengan kemajuan teknologi militer semakin memperumit lingkungan operasional dan potensial mengganggu keseimbangan kekuasaan di tingkat regional dan global.

Dalam konteks global di mana sifat universal hak asasi manusia dipertanyakan, Prancis mendukung perlindungan nilai-nilai ini, terutama dalam komitmennya pada negara hukum (Morcos, 2021). Melalui bantuan pembangunan publiknya, negara ini

berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek-proyek dan program-program yang didanainya tidak melanggar hak asasi manusia ketika mereka dilaksanakan, dan bahwa mereka cenderung menghasilkan dampak positif yang maksimal untuk mendukung hak asasi manusia. Prancis mendukung proyek-proyek dan program-program untuk pendidikan dalam hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan pembela hak asasi manusia, dan akses ke hukum dan keadilan (France Diplomatie, 2021, p. 14). Prancis terus menganalisis perkembangan hak asasi manusia di wilayah Indo-Pasifik dan menggunakan dialog politik yang dijalinnya dengan wilayah tersebut, serta tindakan yang dilakukannya dalam badan-badan multilateral, termasuk dalam Komisi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), untuk menangani kasus-kasus pelanggaran dan penyalahgunaan yang paling mengkhawatirkan (Morcos, 2021).

Bisa dianggap bahwa melalui kebijakan luar negeri yang terstruktur dan aktif, Prancis berusaha memastikan bahwa Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang bebas, terbuka, dan inklusif, yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran bersama. Ini menggambarkan strategi yang seimbang antara kepentingan nasional dan kontribusi terhadap stabilitas regional, menegaskan posisi Prancis sebagai aktor penting di panggung global.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bergantung pada pengamatan manusia atau peneliti itu sendiri (Moleong, 2018). Kualitatif juga dianggap sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat yang tertulis dari sumber-sumber yang memiliki pemahaman yang baik atas fenomena yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini akan menghasilkan data non numerik yang dapat menjelaskan gejala-gejala dalam fenomena yang diteliti.

## **KERANGKA ANALITIK**

### **Neorealisme**

Teori Neorealisme melihat dunia yang dipenuhi oleh dinamika konflik dan kerja sama antarnegara, ilmu hubungan internasional memiliki peran sentral dalam memahami dan menjelaskan perilaku negara-negara di tingkat internasional. Salah satu teori utama

yang telah membentuk dasar pemahaman ini adalah teori neorealis, yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz, seorang ilmuwan politik terkemuka.

Teori neorealisme muncul sebagai tanggapan terhadap teori realisme klasik yang dianggap terlalu sederhana dalam menjelaskan hubungan internasional. Waltz, dalam bukunya yang terkenal "Theory of International Politics" yang diterbitkan pada tahun 1979, memperkenalkan konsep dasar yang mendasari teori ini.

Menurut Waltz, teori neorealisme mencoba untuk memahami tindakan negara dalam kerangka sistem internasional yang dipengaruhi oleh struktur sistem (Waltz, 1979, pp. 131-135). Dia berpendapat bahwa sistem internasional merupakan faktor penentu utama dalam membentuk perilaku negara. Dalam konteks ini, struktur sistem merujuk pada distribusi kekuatan di antara negara-negara besar di dunia (Waltz, 1979, pp. 39-45).

Teori neorealisme Waltz dapat dibagi menjadi dua level analisis utama: level sistem dan level unit. Di level sistem, perhatian difokuskan pada pengaruh struktur sistem internasional, sementara di level unit, perhatian ditujukan pada tindakan individu negara (Waltz, 1979, pp. 42-43).

Pada level sistem, Waltz mengidentifikasi dua jenis utama sistem internasional: sistem bipolar dan multipolar. Dalam sistem bipolar, dua negara besar mendominasi dan mengontrol mayoritas kekuatan di dunia (Waltz, 1979, pp. 42-43). Sebaliknya, dalam sistem multipolar, lebih dari dua negara besar bersaing untuk memegang kendali (Waltz, 1979, pp. 47-49). Waltz berpendapat bahwa perilaku negara dalam sistem ini akan berbeda.

### **Supremasi Struktur Anarkis**

Dalam studi HI, regionalisme merupakan konsep yang erat kaitannya dengan Studi Kawasan (Area Studies). Richard W. Mansbaach mendefinisikan suatu wilayah sebagai suatu kelompok yang secara geografis mempunyai ikatan erat yang dicirikan oleh kesamaan ciri-ciri budaya, perdagangan, saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi, dan keanggotaan dalam organisasi internasional. (Hopkins & Mansbaach, 1973).

Lebih lanjut, regionalisme juga dianggap sebagai konsep yang terbagi ke dalam dua jenis pengelompokan dimana pertama, regionalisme berdasarkan faktor kedekatan

geografis. Pada regionalisme jenis ini dapat dipahami sebagai adanya suatu kerjasama dalam berbagai bidang oleh negara–negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Kedua, adalah aktivitas non-government dan non-geografis yang merujuk pada berbagai aktifitas kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh negara yang secara letak geografis tidak berdekatan (Mansfield & Milner, 1999).

### **Konsep Kebijakan Luar Negeri**

K.J Holsti merupakan salah satu akademisi HI yang mengulas secara terperinci mengenai teori kebijakan luar negeri. Menurutnya, secara teoritis kebijakan luar negeri merupakan kumpulan gagasan yang dirumuskan dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan atau melakukan perubahan di suatu wilayah (Holsti K. J., 1983). Terdapat perbedaan tujuan dan perbedaan kebijakan masing-masing negara, dalam politik luar negeri setiap negara harus sejajar dan mempunyai pemahaman dalam melakukan kerjasama, hal ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan pribadi dan kepentingan kolektif. Politik luar negeri merupakan salah satu langkah yang diambil oleh setiap negara, untuk memperoleh keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, memperoleh gengsi dan bertujuan untuk menjaga keamanan bersama (Holsti K. J., 1983).

Dalam teori politik luar negeri, terdapat beberapa rumusan yang menjadi tujuan suatu negara menetapkan dan melaksanakan politik luar negeri, yaitu (Holsti K. J., 1983):

1. Nilai, pada tujuan suatu negara merupakan salah satu faktor penting dari adanya dorongan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Hal ini karena, kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada tujuan suatu negara.
2. Unsur waktu, dalam melakukan kebijakan luar negeri terdapat unsur waktu yang targetnya harus terpenuhi dalam melakukan pencapaian tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, merupakan salah satu tuntutan yang harus dijalankan oleh negara anggota dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.
4. Kemampuan negara dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri didasarkan pada serangkaian asumsi dan tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan skala nasional. Sementara itu, komponen kebijakan luar negeri mencakup

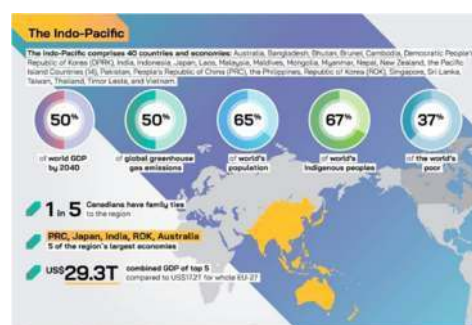
gagasan dan sikap negara lain, serta keputusan dan tindakan yang harus diambil sehubungan dengan permasalahan yang relevan. (Holsti K. J., 1983).

## HASIL PEMBAHASAN

### Strategi Perancis dalam Mencapai Kepentingan Nasionalnya di Kawasan Indo Pasifik Dinamika Kawasan Indo-Pasifik dan Dampaknya bagi Perancis

Secara geostrategis, kawasan Indo-Pasifik sendiri merupakan pembahasan mengenai perkembangan isu di politik internasional. Dimana secara luas mengacu pada tatanan keamanan yang mengedepankan kepentingan maritim. Hal ini kemudian berkembang pada isu-isu lainnya yang saling berkaitan satu sama lain, seperti aktivitas ekonomi yang secara langsung mempengaruhi stabilitas dan keamanan maritim.

**Gambar 1.1 Angka Kontribusi Indo-Pasifik terhadap Dunia**



Hal ini dikarenakan Indo-Pasifik merupakan wilayah yang melintasi dua samudra dan dua benua, yang menumbuhkan potensi sektor ekonomi. Bahkan Indo-Pasifik sendiri disebut sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi dunia, dikarenakan tiga negara dengan ekonomi terbesar, Amerika Serikat, China dan Jepang bergerak di kawasan tersebut. Terlebih aktor yang terlibat didalamnya tidak hanya mendominasi di bidang ekonomi, namun juga memainkan peran penting pada bidang pertahanan, yakni Amerika Serikat dan China. Dimana hal ini kemudian mendorong pada kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan dalam dinamika politik dan keamanan global (Simon, 2013).

Melalui peningkatan aktivitas ekonomi tersebut mendorong pada peningkatan aktivitas keamanan yang dilakukan banyak negara. Terlebih isu-isu low politics seperti isu lingkungan dan iklim yang juga saat ini sudah mulai ditekankan di kawasan ini, yang kemudian mendorong peningkatan dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Untuk itu, kawasan Indo-Pasifik sendiri dianggap sebagai kawasan strategis karena banyak negara yang

melibatkan kepentingan nasional dalam interaksinya di kawasan Indo-Pasifik.

### **Pentingnya Kawasan Indo-Pasifik bagi Prancis**

Prancis menjadi negara Eropa pertama yang menunjukkan ketertarikannya terhadap Indo-Pasifik. Dimana pada 2018, Presiden Macron menyatakan kepentingan Prancis di kawasan tersebut, salah satunya untuk membangun hubungan baru dengan Asia. Dimana hal tersebut kemudian diperkuat dengan dirilisnya berbagai dokumen oleh Kementerian Eropa dan Luar Negeri yang berisi kebijakan-kebijakan Prancis di kawasan Indo-Pasifik. Penetapan poros strategi dan prinsip Prancis terhadap kawasan Indo-Pasifik berlangsung ditandai oleh munculnya tantangan kebangkitan China yang semakin intensif. Dimana kebangkitan tersebut berkaitan secara langsung dengan persaingannya dengan Amerika Serikat.

Fokus utama Prancis pada awalnya berkaitan dengan kebijakan keamanan yang berkorelasi dengan Kementerian Angkatan Bersenjata. Pada tahun 2018, Prancis kemudian mengirimkan kapal induk yang dipimpin oleh kapal bertenaga nuklir. Disamping itu, Prancis juga melakukan latihan angkatan laut bersama dengan mitra regionalnya. Dibawah kepemimpinan Presiden Macron, Prancis berusaha lebih aktif dalam kebijakan luar negerinya di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Macron membentuk strategi dan visi Uni Eropa untuk lebih terlibat dengan Indo-Pasifik. Lokasi Indo-Pasifik yang terletak diantara Samudera Hindia dan Pasifik mendorong Prancis untuk mengambil peran sebagai jembatan antara dua wilayah (Duggal, 2022). Prancis menetapkan lima tujuan utama di Indo-Pasifik, yakni:

1. Melindungi dan mempertahankan wilayah, warga, negara dan ZEE Prancis;
2. Meningkatkan kerjasama keamanan (termasuk militer untuk mencapai perdamaian dan stabilitas bersama);
3. Menjaga akses terhadap domain bersama di Indo-Pasifik;
4. Mendorong aksi multilateral untuk memajukan stabilitas strategis dan keseimbangan kekuatan militer;
5. Mengatasi ancaman keamanan akibat perubahan iklim (Duggal, 2022).



stabilitas regional dan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

**Kepentingan Aliansi Trilateral AUKUS terhadap Kawasan Asia-Pasifik**

Kepentingan negara dan perkembangan teknologi merubah wilayah geografis tertentu sebagai wilayah yang mengalami peningkatan nilai strategis, seperti perairan internasional sebagai jalur transportasi perdagangan dunia. Kondisi itu membuat setiap negara di dunia bergantung pada kepentingan keamanan jalur transportasi untuk menjamin berbagai kegiatan ekonomi dan keamanan negara. Hal itu menjelaskan bahwa wilayah perairan menjadi objek kebijakan geopolitik dimana setiap negara cenderung berkompetisi dan bahkan mengarah pada tensi konflik ketika terdapat kepentingan yang saling berbenturan. Terlebih lagi, ketika wilayah perairan dapat dikontrol, maka kekuatan negara terhadap negara lain akan meningkat. Kontrol wilayah menjadi variabel yang memungkinkan negara untuk mempengaruhi negara lain dan membatasi negara lain dalam meningkatkan kekuatan atau mencapai kepentingan.

Keterlibatan banyak negara melalui kebijakan luar negeri untuk terlibat dalam berbagai isu menyangkut wilayah Asia-Pasifik menjelaskan tidak hanya perubahan nilai strategis wilayah Asia-Pasifik, namun juga menjadi wilayah kompetisi distribusi kekuatan antar negara. Dalam kasus kehadiran negaranegara besar di Asia-Pasifik, faktor pendorong kebijakan strategis seperti negara Amerika Serikat tidak terlepas dari kepentingan nasional negara tersebut dalam mempertahankan pengaruh global sekaligus menghadapi kebangkitan China dan Rusia sebagai ancaman di kawasan Asia- Pasifik. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah berupaya untuk mencapai stabilitas melalui pengembangan kapasitas dan kerja sama regional, jika memungkinkan, dan pencegahan jika diperlukan. Tindakan peningkatan kapasitas, seperti bantuan keuangan, penyediaan aset, pelatihan dan pendidikan militer, serta skema kerja sama regional.

AUKUS merupakan langkah aliansi yang diambil oleh Australia guna membentuk keamanan kolektif. Keamanan kolektif (Collective Security) juga merujuk pada penerapan prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu. Sehingga dapat dianggap bahwa AUKUS menjalankan fungsi sebagai kesepakatan pertahanan kolektif yang melindungi anggotanya (khususnya Australia) dari ancaman keamanan langsung dari Cina, sebagai negara yang dianggap agresor. Akan tetapi AUKUS seolah melupakan bahwa keamanan kolektif yang

berupaya diciptakan membutuhkan koordinasi dan kesediaan dari negara-negara lain di kawasan.

Menjadi sesuatu yang wajar ketika pengumuman kesepakatan mengenai pakta pertahanan ini justru mengundang kritik dan kekhawatiran dari negara lain yang pada dasarnya merasa minim melakukan tindakan-tindakan agresif. Negara tetangga langsung Australia, yakni Indonesia melalui Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, menyatakan bahwa Indonesia merasa was-was atas terbentuknya AUKUS.

Letak geografis Australia membuat Indonesia sangat khawatir bahwa AUKUS akan menciptakan peningkatan signifikan dalam proyeksi kekuatan di Asia-Pasifik. Indonesia dengan jelas mengambil posisi untuk menekankan kewajiban semua pihak untuk menjaga perdamaian dan keamanan melalui penghormatan atas hukum internasional yang berlaku. Negara selanjutnya yang menunjukkan keberatan adalah Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menyampaikan keberatan pembelian kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia pasca pertemuan yang dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Menlu Abdullah menyampaikan bahwa: “Kami sepakat soal isu terbaru di kawasan mengenai negara di dekat kami yang membeli kapal selam bertenaga nuklir baru. Meskipun negara itu tidak memiliki kapasitas untuk senjata nuklir, kami khawatir dan risau.”

Malaysia menyatakan bahwa mereka mengharapkan bahwa negara-negara Asia Tenggara dapat mencapai konsensus yang jelas merespons bentuk keamanan kolektif di Asia-Pasifik antara Australia, AS, dan Inggris tersebut. Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein menegaskan juga bahwa Malaysia teguh dan konsisten bahwa pembentukan AUKUS menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengancam perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Sehingga ia langsung menjadwalkan kunjungan ke Cina menangani isu ini dengan baik dan melalui tata cara diplomatik yang sesuai.

**Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Keamanan Regional Asia-Pasifik**

Perlombaan senjata adalah salah satu faktor yang bisa menimbulkan security dilemma. Security dilemma bukan hal baru dalam kajian keamanan, dari sini bisa terlihat juga sebuah ancaman keamanan. Tindakan ini juga bisa dikatakan sebagai tindakan ofensif yang dimana akan menimbulkan ancaman kepada negara lain. Masing- masing

pemimpin negara AUKUS, Scott Morrison (Australia), Boris Johnson (United Kingdom), dan Joe Biden (United State of America) menyatakan dengan jelas bahwa AUKUS tidak akan melanggar Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) yang turut disepakati dan ditandatangani oleh ketika negara tersebut pada tanggal 1 Juli 1968. Jika hal ini untuk defensif, tetapi tidak bisa dihilangkan akan terjadi ketegangan khususnya antara AUKUS dan Tiongkok yang bisa saja mejadi pemicu perang nuklir. Secara logis hal tersebut bukan hanya merugikan kedua belah pihak yang konflik akan tetapi berefek kepada kawasan Asia-Pasifik bahkan untuk perdamaian dunia. Perlu diketahui bahwa dalam NPT, setiap negara yang ikut serta dalam penandatanganan telah sepakat dan komitmen untuk melakukan batasan terhadap senjata nuklir.

Munculnya AUKUS tentunya menarik perhatian dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik khususnya Tiongkok yang menjadi oposisi dari Amerika Serikat. Khususnya di kawasan Asia-Pasifik mulai dari militer hingga ekonomi memang didominasi oleh Tiongkok dan ketika negara menentang Tiongkok dapat berpengaruh kepada ekonomi dan keamanan kawasan. Dengan begitu, perlindungan ekonomi sangat penting dalam upaya pencegahan ketidakstabilan atau bahkan kejatuhan. Dominasi kekuatan Tiongkok dalam berbagai aspek baik militer ataupun ekonomi di kawasan Asia-Pasifik inilah yang menjadikan AUKUS sebagai jalan untuk distribusi kekuatan di kawasan tersebut, bukan sekadar dominasi kekuasaan Tiongkok dalam kawasan.

Hal ini memang disoroti oleh Tiongkok bahwa perjanjian AUKUS merupakan sinyal dari Washington sebagai peringatan untuk menangkis bahkan melawan bagaimana perkembangan kekuatan militer dari Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengartikulasikan terdapat bahaya yang dihasilkan dari AUKUS termasuk lemahnya rezim yang non-proliferasi nuklir dan meningkatnya kompetisi nuklir. Pandangan dari Beijing memang sebagai lawan dari pihak AUKUS. Akan tetapi peluang dalam meningkatnya kompetisi nuklir bisa saja terjadi khususnya negara yang dominan di kawasan dan inilah yang nantinya akan menjadi ancaman dikawasan tersebut.

Kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok bukan hanya terhadap kawasan Asia-Pasifik bahkan pengaruhnya dalam kekuatan global juga meningkat. Pada dasarnya Australia sadar bahwa kekuatan Tiongkok memiliki kapasitas atau kemampuan untuk

serangan jarak jauh bahkan jangkauan untuk melakukan serangan ke Australia. Dengan itu perlu adanya pembenahan oleh Australia karena ini menjadi salah satu urgensi Australia dalam keamanan. Australia pun cukup khawatir jika tidak dapat mengantisipasi serangan militer Tiongkok, dengan ini pakta AUKUS lah memberi akses persenjataan kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh. Perlu kita ketahui juga bahwasanya saat ini kawasan regional Asia-Pasifik menjadi tempat atau ladang dari ekonomi dan geopolitik global.

Tidak dapat dipungkiri bahwa AUKUS adalah respon dari kekuatan Tiongkok dan sebaliknya yaitu Tiongkok sebagai negara kuat di Asia-Pasifik mengancam dan menganggap ini ancaman. Serta negara lain yang menanggapi AUKUS sebagai ancaman atau tidak bergantung dari posisi negara tersebut. ASEAN sebagai entitas yang ada di Asia-Pasifik seharusnya bisa lebih terbuka dengan peluang yang memang dapat menguatkan keamanan seperti Kerjasama secara ketentuan regional ataupun dari eksternal. Pada akhirnya, Kerjasama penguatan juga dapat berefek kepada tumbuhnya kepercayaan strategis sehingga bisa mengedepankan konsep keamanan dalam kawasan dengan tujuan mengurangi hambatan hubungan antar negara.

**Dampak AUKUS terhadap Dinamika dan Keamanan Regional Asia-Pasifik**

Di dalam perubahan hubungan internasional pasca berakhirnya Perang Dingin mempengaruhi stabilitas strategis hubungan internasional di kawasan Asia- Pasifik. Hal itu dikarenakan secara geo-strategi, perubahan tidak hanya terjadi di tingkat global tetapi juga di tingkat kawasan, termasuk Asia-Pasifik. Perkembangan lingkungan strategis keamanan yang kompleks di Asia-Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin dapat dikenali dengan pergeseran kekuatan diantara negara-negara besar, kemunculan bertahap suatu lingkungan keamanan multipolar dengan suatu kekuatan Negara besar Asia yang memainkan peran lebih besar, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan cenderung tak dapat diduga yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara geoekonomi, terjadinya peningkatan yang signifikan dari industri pertahanan dan kemampuan militer lokal negara-negara di kawasan, dan kemungkinan terjadinya ketegangan etnik dan nasional, rivalitas ekonomi, aspirasi ketidakpuasan berkenaan dengan tingkat kesejahteraan, konflik keagamaan dan ras.

Dalam *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) di Manila beberapa tahun yang lalu digelar pertemuan sejumlah pemimpin negara yang berpengaruh terhadap kepentingan Amerika Serikat (AS) yaitu India, Australia, dan Jepang. Forum tersebut mengangkat Asia-Pasifik sebagai istilah baru yang tidak hanya menggantikan Asia-Pasifik secara penyebutan maupun cakupan geografis, namun juga perluasan actor, power dan struktur di kawasan. Tujuan penggantian nama tersebut untuk mendorong iklim kerjasama yang lebih terbuka di kawasan, AS sebagai inisiator menekankan bahwa Asia-Pasifik merupakan tahap awal menuju transformasi geopolitik di kawasan.

Penyebutan “Asia” dirasa terlalu luas, heterogen dan berkonotasi kontinental daripada maritim, sementara sebutan “Asia Pasifik” yang menunjuk bagian Asia di Samudra Pasifik terasa tidak memadai. Sebutan “Indo-Pacific” (gabungan dari Indian Ocean dan Pacific Ocean) dirasa memadai atau mewakili kebutuhan tersebut. Penyebutan Asia-Pasifik juga tidak terlepas dari meningkatnya posisi superioritas India memasuki abad 21 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi India yang impresif pada dekade 1990-an dan pengembangan senjata nuklirnya.

**Posisi Indonesia sebagai Negara di Kawasan Asia Pasifik terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) dalam Perspektif Neorealisme**

Berdasarkan Dyas Bintang, dkk. bahwa manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni di Laut Tiongkok Selatan adalah disepakatinya sebuah pakta keamanan yang diusung sebagai aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS). Perjanjian keamanan trilateral tersebut diratifikasi pada tanggal 15 September 2021 oleh ketiga negara yang terlibat dengan tujuan pokok menyediakan armada kapal selam bertenaga nuklir bagi Angkatan Laut Australia selama beberapa dekade mendatang. Kesepakatan ini disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden sebagai keharusan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik dalam jangka panjang. Dalam pakta tersebut, disajikan sebuah tujuan implisit untuk mengimbangi dominasi RRT pada konflik Laut Tiongkok Selatan meskipun tidak secara gamblang menyinggung RRT di dalamnya. Di sisi lain, perjanjian ini menyebabkan krisis diplomatic dengan Perancis akibat kehilangan kontrak akuisisi alutsista dengan Australia sejak 2016 untuk penyediaan 12 kapal selam bertenaga konvensional Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah persoalan panas yang telah melahirkan konflik dengan keterlibatan sejumlah negara di sekitar kawasan tersebut

hingga negara di luar kawasan. Manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni di Laut Tiongkok Selatan adalah disepakatinya sebuah pakta keamanan yang diusung sebagai aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS). Penelitian ini menganalisis posisi Indonesia beserta langkah kebijakan dan persiapan yang proporsional terhadap fenomena Aliansi AUKUS dalam perspektif teori neorealisme. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif secara penuh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan maupun teori neorealisme melalui jurnal nasional hingga internasional. Penelitian ini turut membahas beberapa poin strategis yang potensial untuk dimanfaatkan oleh Indonesia dalam menyikapi Aliansi AUKUS. Perspektif neorealisme menuntut Indonesia untuk berpandangan lebih holistik, bahwa kekuatan (power) suatu negara adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Hal tersebut meliputi faktor kondisi geografis, postur militer yang dimiliki Indonesia, hingga bagaimana langkah politis yang dapat dianjurkan bagi Indonesia.

## KESIMPULAN

Hampir semua negara ASEAN menyatakan prihatin dengan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Negara ASEAN khususnya Indonesia mengingatkan kembali komitmen Australia terhadap non-proliferasi nuklir dan juga keamanan serta stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Meski pejabat ketiga negara AUKUS berkali-kali menekankan aliansi ini tidak ditujukan kepada negara tertentu, sebagian besar analis mengatakan, China-lah yang memicu pembentukan AUKUS.

Pada akhirnya respon dari negara-negara ASEAN terhadap AUKUS sudah mulai terlihat paling tidak sampai dengan saat penelitian ini dilakukan adalah menganggap sebagai sebuah ancaman meskipun ada beberapa alasan juga bahwa itu merupakan peluang tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abensour, M. (2023, Maret 1). What is France's strategy for Indo-Pacific all about? Retrieved from thejakartapost.com: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/03/01/what-is-frances-strategy-for-indo-pacific-all-about-.html>

- Anbumozhi, V., Breiling, M., Pathmarajah, S., & Reddy, V. R. (2012). *Climate Change in Asia and the Pacific: How Can Countries Adapt?* New Delhi, India: SAGE Publications India.
- ASEAN. (2020). *ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC*. Bangkok: ASEAN.
- Bachelier, J., & Frécon, E. (2021, Desember 21). *France's Defense Strategy in the Indo-Pacific*. Retrieved from thediplomat.com:  
<https://thediplomat.com/2021/12/frances-defense-strategy-in-the-indo-pacific/>
- Bainus, A., Sari, D. S., Yulianti, D., Aditiani, S., Sudirman, A., Zahid, A., .
- Rifia.(2023). *Health Security In The Indo-Pacific: A Prospect For Indonesia*. Journal of Vytautas Magnus University, Vol. 16, No. 3, 3132-3140.
- Bang, A., & Sumaila, R. (2021, Desember 12). *In the wake of COP26, Asia's troubled oceans must not be left high and dry*. Retrieved from scmp.com:  
<https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3157397/wake-cop26-asias-troubled-oceans-must-not-be-left-high-and-dry>
- Baruah, D. M. (2022, March 23). *What Island Nations Have to Say on Indo-Pacific Geopolitics*. Retrieved from carnegieendowment.org:  
<https://carnegieendowment.org/2022/03/23/what-island-nations-have-to-say-on-indo-pacific-geopolitics-pub-86700>
- Bonikowska, M. (2023). *France is 'Back' in the Indo-Pacific*. Retrieved from CSM:  
<https://csm.org.pl/france-is-back-in-the-indo-pacific/>
- Brattberg, E., Coree, P. L., & Soula, E. (2018, Juli 5). *Can France and the UK Pivot to the Pacific?* Retrieved from Carnegie Endowment:  
<https://carnegieendowment.org/2018/07/05/can-france-and-uk-pivot-to-pacific-pub-76732>
- Chaudhury, D. R. (2022). *France and Australia hint at reviving trilateral with India*. Retrieved from Economic India Times:  
<https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/france-and-australia-hint-at-reviving-trilateral-with-india/articleshow/92639456.cms>.
- Christie, E. H., Buts, C., & Bois, C. D. (2023). *Demand for Military Expenditures and Security Alignment Choices in the Indo-Pacific*. *Defence and Peace Economics*, Vol. 34, No. 5, 581-602.
- Davidson, H. (2023, September 8). *Competition over the South China Sea explained in 30 seconds*. Retrieved from theguardian.com:

<https://www.theguardian.com/world/2023/sep/08/competition-over-the-south-china-sea-explained-in-30-seconds>

Delaporte, M. (2021, Maret 11). France In The Indo-Pacific: A Mediating Power? Retrieved from [breakingdefense.com](https://breakingdefense.com):

<https://breakingdefense.com/2021/03/france-in-the-indo-pacific-a-mediating-power/>

France Diplomatie. (2021). France's Indo-Pacific Strategy. Retrieved from [diplomatie.gouv.fr](https://diplomatie.gouv.fr):

[https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/en\\_dcp\\_a4\\_indopacifique\\_022022\\_v1-4\\_web\\_cle878143.pdf](https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/en_dcp_a4_indopacifique_022022_v1-4_web_cle878143.pdf)

France Government. (2021). France Indo-Pacific Strategy. Paris: France Government.

France Indo-Pacific. (2023). France and Indo-Pacific. Retrieved from France Indo-Pacific: <https://indopac.fr/france-indo-pacific/>

France Ministry for Europe and Foreign Affairs. (2021). France's Indo-Pacific Strategy Summary. Paris: France Ministry for Europe and Foreign Affairs.

Frécon, E. (2022). France's Third Path" for the Indo-Pacific? Credentials and Challenges. Singapore: ISEAS.

Frécon, E. (2022, Februari 15). France's Third Path" for the Indo-Pacific? Credentials and Challenges. Retrieved from [iseas.edu.sg](https://www.iseas.edu.sg): [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/01/ISEAS\\_Perspective\\_2022\\_12.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/01/ISEAS_Perspective_2022_12.pdf)

Gady, F.-S. (2017, November 13). 3 US Carrier Strike Groups Hold Massive Naval Drill with South Korean, Japanese Navies in Western Pacific. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/11/3-us-carrier-strike-groups-hold-massive-naval-drill-with-south-korean-japanese-navies-in-western-pacific/>

Galloway, A. (2021, September 16). What's the Indo-Pacific – and how does the Quad work? Retrieved from [smh.com.au](https://www.smh.com.au): <https://www.smh.com.au/national/forget-asia-pacific-it-s-the-indo-pacific-we-live-in-now-where-is-that-exactly-20210810-p58hku.html>

Gaspar, V., & Rhee, C. Y. (2021, Maret 25). Asia-Pacific, the Gigantic Domino of Climate Change. Retrieved from IMF:

<https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2021/03/25/asia-pacific-the-gigantic-domino-of-climate-change>

Holsti, K. J. (1983). *International Politics: A Framework for Analysis*. London: Prentice Hall.

Holsti, O. R. (1989). *Models of International Relations and Foreign Policy*. *Diplomatic History*, Vol.13, No.1, 15-43.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Zhang, R. (2021, Februari 28). *South China Sea: why France is flexing its muscles in the contested waters*. Retrieved from [scmp.com](https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3123342/south-china-sea-why-france-flexing-its-muscles-contested):

<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3123342/south-china-sea-why-france-flexing-its-muscles-contested>